

Grebeg Suro sebagai *Living Pancasila*: laboratorium integrasi sosial dan penguatan identitas nasional di Ponorogo

Kenlies Era Rosalina Marsudi ¹, Romadhona Kusuma Yudha ², Anisia Nur Mitha Sari ³

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo, Indonesia

²³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima: 2026-02-04 Disetujui: 2026-06-20 Kata kunci: Grebeg Suro Integrasi Sosial Living Pancasila Keywords: <i>Grebeg Suro</i> <i>Social Integration</i> <i>Living Pancasila</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo sebagai manifestasi <i>living Pancasila</i>. Sejak diinisiasi pada tahun 1987, tradisi ini berkembang menjadi laboratorium sosial yang membumikan ideologi negara melalui partisipasi masif berbagai elemen masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini membedah tiga aspek utama. Pertama, praktik Sila 1 hingga 5 ditemukan dalam rangkaian kegiatan: aspek religius (Sila 1), workshop edukatif (Sila 2), kompetisi seni Reog (Sila 3), musyawarah komunitas (Sila 4), dan pemberdayaan ekonomi (Sila 5). Kedua, mekanisme integrasi sosial tercipta melalui ruang pertemuan inklusif yang meluruhkan sekat antara kelompok santri, seniman, birokrat, pelajar, pelaku UMKM, hingga komunitas hobi. Ketiga, kearifan lokal ini mengonstruksi identitas nasional dengan menyintesis kebanggaan lokal menjadi fondasi nasionalisme yang tangguh. Hasil penelitian menegaskan bahwa Grebeg Suro bukan sekadar pesta rakyat, melainkan instrumen penguatan karakter kewarganegaraan yang mampu menyatukan seluruh strata sosial dalam bingkai kebinekaan. ABSTRACT <i>This research aims to analyze the Grebeg Suro tradition in Ponorogo Regency as a manifestation of living Pancasila. Since its initiation in 1987, this tradition has evolved into a social laboratory that grounds the state ideology through the massive participation of various social elements. Using a qualitative approach, this study examines three main aspects. First, the practice of the 1st to 5th Sila is identified in the activities: religious aspects (1st Sila), educative workshops (2nd Sila), Reog art competitions (3rd Sila), community deliberations (4th Sila), and economic empowerment (5th Sila). Second, the mechanism of social integration is created through inclusive meeting spaces that dissolve barriers between religious groups (santri), artists, bureaucrats, students, MSME actors, and hobbyist communities. Third, this local wisdom constructs a national identity by synthesizing local pride into a resilient foundation of nationalism. The results emphasize that Grebeg Suro is not merely a folk festival, but an instrument for strengthening civic character capable of uniting all social strata within the framework of diversity.</i>

Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi negara sering kali terjebak dalam ruang formalitas kenegaraan dan teks konstitusi yang statis, sehingga cenderung kehilangan resonansinya sebagai pemandu kehidupan praktis di tingkat akar rumput. Di tengah arus globalisasi yang masif dan ancaman polarisasi sosial, terdapat urgensi besar untuk mereaktualisasi Pancasila sebagai *living ideology* yang terimplementasi dalam praktik sosial dan kebudayaan masyarakat secara nyata. (Anggoro, et.al: 2023). Kabupaten Ponorogo menjadi wilayah yang sangat relevan untuk dikaji karena memiliki instrumen unik dalam membumikan nilai-nilai tersebut melalui perayaan Grebeg Suro. Tradisi yang telah diformalkan sejak tahun 1987 oleh Bupati Soebarkah Poetro Hadiwirjo ini telah berevolusi dari sekadar ritual tirakatan para warok menjadi sebuah festival inklusif yang melibatkan berbagai strata social mulai dari kalangan santri, seniman, birokrat, pelajar, hingga pelaku ekonomi (Hanif, M. & Zulianti: 2012). Partisipasi kolektif ini secara nyata memposisikan Grebeg Suro sebagai "Laboratorium Pancasila", sebuah ruang publik tempat nilai-nilai luhur bangsa dipraktikkan, diuji, dan diinternalisasi secara sukarela oleh warga negara.



Kajian mengenai integrasi budaya dan nilai nasional telah menjadi perhatian para akademisi, namun fokus yang diberikan masih memiliki celah penelitian yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Diaz Supandi (2024) fokus mengenai bagaimana peningkatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan budaya Grebeg Suro Ponorogo. Sebagai pembanding, terdapat penelitian dari Rifqi Putra Al Ghifari dan Sri Wibawani (2026) yang berfokus pada *collaborative governance* yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada pada Grebeg Suro Ponorogo telah berjalan dengan baik antara berbagai elemen penyelenggara baik pemerintah maupun swasta namun riset tersebut belum menyentuh aspek masyarakat dan internalisasi nilai Pancasila di dalam aktivitas tersebut. Di sisi lain, Elina Nurrohmah (2023) dalam risetnya mengenai tradisi Grebeg Suro melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber memberikan gambaran umum tentang integrasi sosial tetapi tidak secara spesifik menggunakan kacamata Pendidikan Kewarganegaraan ataupun perspektif *living Pancasila* dalam konteks spesifik Grebeg Suro. Hal ini menunjukkan adanya *research gap*, dimana kajian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek pariwisata, ekonomi, atau estetika seni Reog. Oleh karena itu, *novelty* atau kebaruan yang ditawarkan dalam artikel ini adalah penggunaan konsep "Laboratorium Pancasila" untuk membedah rangkaian kegiatan Grebeg Suro 2025 secara mendetail mulai dari dimensi religius Simaan Al-Quran hingga dimensi keadilan ekonomi UMKM sebagai strategi penguatan identitas nasional yang inklusif. Kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek pariwisata, ekonomi budaya, tata kelola penyelenggaraan, dan makna sosial budaya tradisi, sehingga belum menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan melalui rangkaian kegiatan Grebeg Suro serta kontribusinya terhadap integrasi sosial dan penguatan identitas nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Grebeg Suro sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Pancasila, mekanisme integrasi sosial lintas kelompok masyarakat, serta sarana penguatan identitas nasional berbasis kearifan lokal.

Untuk membedah fenomena ini secara akademis, penelitian ini menggunakan dua pilar teoretis yang saling berintegrasi sebagai pisau analisis. Pertama, teori Praksis *Living Pancasila* yang memandang Pancasila bukan sekadar objek kontemplasi filosofis, melainkan sebagai habitus atau tindakan praktis yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat (Latif, 2011). Dalam penelitian ini, konsep *living Pancasila* dioperasionalkan sebagai manifestasi empiris nilai-nilai Pancasila yang dapat diamati melalui praktik sosial, interaksi budaya, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Grebeg Suro. Operasionalisasi konsep ini dilakukan melalui tiga indikator utama. Pertama, dimensi praksis nilai Pancasila yang tercermin dalam aktivitas keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kedua, dimensi partisipasi kolektif yang menunjukkan keterlibatan berbagai kelompok sosial dalam ruang publik yang inklusif. Ketiga, dimensi internalisasi nilai kewarganegaraan yang tampak melalui praktik gotong royong, toleransi, musyawarah, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, *living Pancasila* tidak dipahami sebagai konsep normatif semata, melainkan sebagai praktik sosial yang dapat dianalisis melalui aktivitas dan interaksi masyarakat dalam tradisi Grebeg Suro.

Kedua, penelitian ini menggunakan teori Kewarganegaraan Budaya (*Cultural Citizenship*) sebagaimana dikembangkan oleh Nick Stevenson (2003). Konsep *Cultural Citizenship* yang dikembangkan oleh Stevenson menekankan bahwa kewarganegaraan tidak hanya diwujudkan melalui status hukum dan hak politik, tetapi juga melalui partisipasi dalam praktik budaya yang membentuk rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih luas. Stevenson menjelaskan bahwa budaya berfungsi sebagai ruang produksi makna kolektif yang memungkinkan individu menghubungkan identitas lokal dengan identitas nasional secara simultan. Dalam perspektif ini, pengakuan terhadap budaya lokal bukanlah ancaman bagi integrasi nasional, melainkan mekanisme penting dalam memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam tradisi budaya seperti Grebeg Suro dapat dipahami sebagai praktik kewarganegaraan budaya yang memungkinkan warga menegaskan identitas lokalnya sekaligus memperkuat keterikatannya terhadap identitas nasional Indonesia.

Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pelestarian budaya Reog dan tradisi Grebeg Suro berkontribusi terhadap pembentukan solidaritas sosial dan penguatan identitas nasional berbasis kebinekaan, dengan menggabungkan kedua teori ini, Grebeg Suro dianalisis sebagai ruang negosiasi di mana *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) ditumbuhkan melalui pengalaman budaya yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini memandang Grebeg Suro tidak hanya sebagai perayaan budaya daerah, tetapi juga sebagai arena aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan praktik kewarganegaraan budaya. Melalui pendekatan *living Pancasila* dan *cultural citizenship*, penelitian ini

berupaya menjelaskan bagaimana aktivitas budaya lokal berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kewarganegaraan, integrasi sosial, dan penguatan identitas nasional secara simultan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pokok permasalahan utama, yaitu: bagaimana manifestasi nyata *living* Pancasila dalam rangkaian agenda Grebeg Suro Ponorogo; bagaimana mekanisme kerja festival ini sebagai laboratorium integrasi sosial lintas identitas masyarakat; serta bagaimana kontribusi strategisnya dalam mengonstruksi identitas nasional di tengah tantangan budaya global. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nyata nilai Pancasila dalam setiap tahapan festival, mendeskripsikan mekanisme peleburan sekat sosial antara kelompok santri, seniman, dan warga umum, serta menjelaskan peran vital kearifan lokal Ponorogo dalam memperkokoh nasionalisme warga negara di era modern. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: Menganalisis manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam rangkaian kegiatan Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk implementasi *living* Pancasila. Menganalisis mekanisme integrasi sosial yang terbentuk melalui penyelenggaraan Grebeg Suro, khususnya dalam mempertemukan berbagai kelompok sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Menganalisis kontribusi Grebeg Suro dalam penguatan identitas nasional melalui pelestarian budaya lokal dan partisipasi kewarganegaraan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan model pembumih ideologi yang dapat direplikasi dalam upaya penguatan integrasi nasional berbasis kebudayaan di wilayah lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis tradisi Grebeg Suro sebagai manifestasi *living* Pancasila, mekanisme integrasi sosial, dan penguatan identitas nasional di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, praktik sosial, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Grebeg Suro. Penelitian dilaksanakan selama periode persiapan hingga pelaksanaan Grebeg Suro Tahun 2025, yaitu sejak Mei hingga Juli 2025. Rentang waktu tersebut dipilih agar peneliti dapat mengamati secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai rangkaian kegiatan Grebeg Suro yang mencakup aspek religius, budaya, sosial, dan ekonomi. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap penyelenggaraan Grebeg Suro. Informan penelitian terdiri atas 12 orang yang meliputi: (1) dua orang perwakilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara kegiatan; (2) dua orang budayawan atau tokoh Reog yang memahami sejarah dan perkembangan Grebeg Suro; (3) dua orang tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan keagamaan festival; (4) dua orang pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam pasar rakyat dan pameran ekonomi; (5) dua orang anggota komunitas seni dan budaya; serta (6) dua orang generasi muda atau pelajar yang aktif mengikuti kegiatan Grebeg Suro. Kriteria pemilihan informan meliputi keterlibatan langsung dalam kegiatan Grebeg Suro, pemahaman terhadap nilai budaya dan sosial yang berkembang dalam festival, serta kesediaan memberikan informasi secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan pada berbagai agenda Grebeg Suro Tahun 2025, termasuk kegiatan religius, Festival Nasional Reog Ponorogo, kirab budaya, pasar rakyat, dan kegiatan komunitas. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh perspektif informan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, proses integrasi sosial, dan pembentukan identitas nasional melalui festival. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip penyelenggaraan Grebeg Suro, dokumen pemerintah daerah, publikasi media massa, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan verifikasi dan pendalaman data secara berkelanjutan. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah, budayawan, tokoh agama, pelaku UMKM, komunitas budaya, dan generasi muda. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, temuan observasi lapangan, serta data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Sebagai contoh, informasi mengenai fungsi Grebeg Suro sebagai sarana

integrasi sosial tidak hanya diperoleh melalui wawancara dengan tokoh budaya, tetapi juga diverifikasi melalui pengamatan langsung terhadap interaksi antarkelompok masyarakat dalam kegiatan festival serta dokumen resmi penyelenggaraan kegiatan. Proses triangulasi ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Living Pancasila: Dari Transendensi Ritual hingga Demokrasi Ekonomi

Konsep living Pancasila menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari. Dalam perspektif ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diamati melalui pola interaksi sosial, aktivitas budaya, partisipasi warga, dan praktik ekonomi yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Dwianto & Hasan, 2025). Sejalan dengan itu, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kearifan lokal dan tradisi budaya memiliki peran strategis sebagai media internalisasi nilai-nilai Pancasila karena mampu menghadirkan pengalaman kewarganegaraan yang bersifat kontekstual dan partisipatif (Tahta, et.al. 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap Grebeg Suro penting dilakukan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Ponorogo. Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo merepresentasikan sebuah fenomena sosiologis di mana Pancasila tidak lagi sekadar teks statis dalam konstitusi, melainkan mewujudkan menjadi living ideology yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia yang multikultural. Berdasarkan observasi mendalam terhadap rangkaian kegiatan tahun 2025, ditemukan bahwa kelima sila Pancasila terinternalisasi dalam struktur festival secara sistematis, membentuk sebuah siklus nilai yang utuh.

Pada dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama), Grebeg Suro menampilkan wajah keberagaman yang inklusif dan moderat (Rifa'i: 2018). Hal ini terbukti dari adanya konvergensi antara praktik ortodoksi agama dan spiritualitas budaya yang berjalan beriringan tanpa konflik (Akifah, A., & Cangara, H.: 2025). Di satu sisi, kegiatan Simaan Al-Quran (4 Juni 2025) dan Istighosah serta Dzikir Bersama Al-Hikmah (16 Juni 2025) yang dipusatkan di Pendopo Agung merepresentasikan kesalehan ritual umat Islam. Ribuan jamaah yang hadir menunjukkan kuatnya basis religiusitas masyarakat. Namun, pada sisi lain, masyarakat yang sama juga merayakan ritual Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel (27 Juni 2025) dan Laku Tirakatan di empat titik perbatasan kota. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo tidak melihat hal ini sebagai dualisme yang bertentangan (Purwo: 2021). Larungan dimaknai bukan sebagai penyembahan terhadap alam, melainkan sebagai manifestasi syukur (tasyakur) kultural atas limpahan rezeki Tuhan. Dengan demikian, Sila Pertama bekerja dengan mendamaikan nalar agama dan nalar budaya, menciptakan model toleransi internal yang matang di mana simbol-simbol lokal digunakan untuk mengagungkan Tuhan.

Manifestasi Sila Kemanusiaan (Sila Kedua) dan Persatuan Indonesia (Sila Ketiga) menemukan momentumnya dalam Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXX. Ajang ini bukan sekadar kompetisi seni tari, melainkan sebuah panggung diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) yang efektif. Partisipasi kontingen dari luar Jawa seperti dari Lampung, Kalimantan Timur, hingga DKI Jakarta mengubah Alun-Alun Ponorogo menjadi "Miniatur Indonesia". Dalam interaksi antar-seniman selama festival berlangsung, terjadi pertukaran nilai kemanusiaan dan apresiasi lintas etnis. "Ruang panggung" berubah menjadi ruang perjumpaan yang meluruhkan sekat-sekat primordial. Lebih jauh, Kirab Pusaka dan Pawai Lintas Sejarah yang melibatkan ribuan warga dari berbagai latar belakang status sosial mulai dari petani, pedagang, hingga pejabat daerah menjadi simbol egalitarianisme. Dalam arak-arakan tersebut, identitas kelas sosial lebur; semua menyatu dalam identitas kolektif sebagai "Wong Ponorogo" yang memiliki sejarah yang sama. Kohesi sosial yang terbentuk dalam kirab ini membuktikan bahwa budaya lokal mampu menjadi perekat persatuan nasional yang lebih kuat daripada sekadar slogan politik.

Pada aspek tata kelola, Grebeg Suro adalah laboratorium nyata bagi Sila Kerakyatan (Sila Keempat) dan Keadilan Sosial (Sila Kelima). Berbeda dengan festival modern yang seringkali bersifat top-down dan elitis, Grebeg Suro dikelola dengan prinsip partisipatoris. Pelibatan berbagai komunitas hobi dalam jadwal resmi 2025 seperti komunitas Bonsai, Sepeda Tua, Offroad, hingga Burung Berkicau menunjukkan berjalannya mekanisme demokrasi deliberatif. Pemerintah daerah tidak

memonopoli agenda, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berekspresi. Implikasi dari demokrasi budaya ini bermuara pada keadilan ekonomi (Khoirurrosyidin: 2018). Keberadaan Bursa Rakyat, pasar malam, dan pameran UMKM di sepanjang jalan protokol selama satu bulan penuh adalah wujud distribusi kesejahteraan. Pedagang kaki lima, pengrajin dadak merak, hingga penyedia jasa parkir mendapatkan dampak ekonomi langsung (*trickle-down effect*). Ini adalah praksis ekonomi Pancasila, di mana perayaan budaya tidak hanya menjadi tontonan estetis, tetapi menjadi tuas penggerak kemandirian ekonomi rakyat kecil.

Grebeg Suro sebagai Mekanisme Integrasi Sosial: Mengurai Segregasi Santri dan Abangan

Dalam kajian sosiologi dan kewarganegaraan, integrasi sosial dipahami sebagai proses pembentukan keteraturan sosial melalui interaksi yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat membangun kesepahaman, solidaritas, dan tujuan bersama (Nasoha, et.al. 2024). Integrasi tidak selalu lahir melalui kebijakan formal negara, tetapi juga dapat tumbuh melalui praktik budaya yang menyediakan ruang interaksi bagi kelompok-kelompok yang berbeda (Rustamana, et.al. 2025). Dalam konteks masyarakat multikultural, budaya lokal sering berfungsi sebagai media yang mempertemukan berbagai identitas sosial dan keagamaan sehingga mampu mengurangi potensi konflik serta memperkuat kohesi sosial (Ode & Rachmawati, 2017). Berdasarkan perspektif tersebut, Grebeg Suro dapat dipahami sebagai instrumen integrasi sosial yang bekerja melalui partisipasi budaya dan pengalaman kolektif masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu fungsi strategis Grebeg Suro adalah kemampuannya menciptakan ruang integrasi bagi kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang berbeda. Secara historis, masyarakat Jawa sering dipetakan ke dalam tipologi sosial yang diperkenalkan Clifford Geertz, yakni kelompok santri yang lebih berorientasi pada praktik keagamaan formal dan kelompok abangan yang cenderung mempertahankan tradisi budaya lokal (Amrozi, 2021). Meskipun klasifikasi tersebut telah mengalami berbagai perubahan dalam masyarakat kontemporer, residu perbedaan orientasi budaya dan keagamaan masih dapat ditemukan. Dalam konteks ini, Grebeg Suro menghadirkan ruang sosial yang memungkinkan kedua kelompok tersebut berinteraksi dalam suasana yang relatif egaliter dan inklusif.

Mekanisme integrasi tersebut tampak dari struktur kegiatan Grebeg Suro Tahun 2025 yang secara bersamaan mengakomodasi ekspresi religius dan ekspresi budaya masyarakat. Kegiatan Simaan Al-Qur'an pada 4 Juni 2025 serta Istighosah dan Dzikir Bersama Al-Hikmah pada 16 Juni 2025 menunjukkan kuatnya dimensi religius dalam festival ini. Pada saat yang sama, masyarakat juga terlibat dalam Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel, Laku Tirakatan, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah, serta berbagai pertunjukan seni tradisional yang menjadi bagian integral dari Grebeg Suro. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa festival tidak dibangun berdasarkan dominasi satu kelompok budaya atau keagamaan tertentu, melainkan melalui pengakuan terhadap keragaman ekspresi sosial yang hidup dalam masyarakat Ponorogo.

Integrasi sosial juga terlihat melalui penempatan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya dalam satu narasi festival yang utuh. Penyelenggaraan kegiatan STKIP PGRI Besholawat Bersama Gus Azmi dalam rangkaian yang sama dengan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXX, pertunjukan Wayang Kulit, dan berbagai atraksi budaya lainnya menunjukkan adanya upaya menghadirkan ruang publik yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Dari perspektif integrasi sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak menjadi sumber segregasi, melainkan berfungsi sebagai titik temu yang memungkinkan berbagai identitas berinteraksi secara konstruktif (Petrus & Siagian, 2025). Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa religiusitas dan tradisi budaya lokal tidak selalu berada dalam posisi yang saling berlawanan, tetapi dapat berkembang secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi sosial dalam Grebeg Suro tidak hanya terjadi pada tingkat simbolik, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan kerja sama sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, penyelenggaraan festival melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, komunitas seni dan budaya, tokoh agama, pelaku UMKM, organisasi kepemudaan, hingga organisasi kemasyarakatan seperti Banser Nahdlatul Ulama (NU) dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). Keterlibatan organisasi-organisasi tersebut dalam pengamanan, koordinasi kegiatan, pelayanan masyarakat, dan berbagai aktivitas pendukung lainnya menunjukkan adanya kolaborasi lintas identitas yang berorientasi pada kepentingan bersama (Palls, 2023). Dalam perspektif modal sosial (*social capital*) (Wahono, et.al.

2022), kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kepercayaan sosial (*social trust*) dan solidaritas masyarakat.

Selain itu, pelibatan berbagai komunitas dalam kegiatan festival, seperti komunitas Bonsai, Sepeda Tua, Offroad, dan Burung Berkicau, memperluas ruang partisipasi masyarakat di luar kelompok budaya dan keagamaan tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Grebeg Suro berhasil menciptakan arena sosial yang mampu menghubungkan berbagai kelompok dengan latar belakang minat, profesi, dan identitas yang beragam. Semakin banyak kelompok yang terlibat dalam aktivitas bersama, semakin besar pula peluang terbentuknya hubungan sosial yang bersifat inklusif dan kolaboratif. Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, pengalaman kolektif yang terbentuk selama proses persiapan dan pelaksanaan Grebeg Suro merupakan bentuk pembelajaran kewarganegaraan yang berlangsung secara langsung. Ketika anggota Banser NU, Kokam Muhammadiyah, komunitas seni Reog, pelaku UMKM, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat umum bekerja sama dalam satu kegiatan, mereka tidak hanya menjalankan tugas masing-masing, tetapi juga belajar membangun toleransi, tanggung jawab sosial, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam pembentukan warga negara yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, Grebeg Suro tidak hanya berfungsi sebagai perayaan budaya tahunan, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi sosial berbasis kearifan lokal yang efektif. Festival ini mampu mempertemukan berbagai kelompok sosial, keagamaan, budaya, dan ekonomi dalam satu ruang partisipasi yang inklusif. Melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan, Grebeg Suro berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial, mengurangi jarak antarkelompok, serta membangun identitas kolektif masyarakat Ponorogo yang selaras dengan nilai-nilai persatuan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat integrasi sosial dan menjaga harmoni masyarakat di tengah tantangan keberagaman pada era kontemporer.

Konstruksi *Cultural Citizenship* dan Penanaman *Civic virtue* di Era Global

Perspektif *Cultural Citizenship* yang dikembangkan oleh Stevenson (2003) memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami hubungan antara budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan pembentukan identitas kebangsaan. Dalam pandangan ini, kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai status hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara, tetapi juga sebagai proses partisipasi dalam praktik-praktik budaya yang membentuk rasa memiliki terhadap komunitas politik yang lebih luas (Azzahra, et.al. 2024). Dengan kata lain, kewarganegaraan tidak hanya diekspresikan melalui keterlibatan dalam institusi politik formal, tetapi juga melalui keterlibatan dalam aktivitas budaya yang memungkinkan individu membangun hubungan emosional dengan komunitas, daerah, dan bangsa. Oleh karena itu, praktik budaya lokal dapat menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan dan memperkuat identitas nasional.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, konsep *cultural citizenship* menjadi semakin relevan karena identitas nasional dibangun di atas keberagaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang dimiliki oleh berbagai daerah (Rasyid, et.al. 2024). Keberagaman tersebut tidak dipandang sebagai hambatan bagi persatuan nasional, melainkan sebagai sumber kekuatan yang memperkaya identitas Indonesia. Sejalan dengan pandangan Stevenson (2003), pengakuan terhadap budaya lokal justru menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya kewarganegaraan yang inklusif. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk mengekspresikan identitas budayanya, mereka akan lebih mudah mengembangkan rasa memiliki terhadap komunitas nasional yang lebih luas (Sari, et.al. 2022). Dengan demikian, hubungan antara identitas lokal dan identitas nasional bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling memperkuat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Grebeg Suro berfungsi sebagai ruang aktualisasi *cultural citizenship* bagi masyarakat Ponorogo. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan selama festival, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan identitas budaya sekaligus menunjukkan partisipasi aktif sebagai warga negara. Partisipasi tersebut tampak dalam keterlibatan masyarakat sebagai pelaku seni, panitia kegiatan, relawan, pelaku UMKM, anggota komunitas budaya, tokoh agama, maupun peserta berbagai agenda festival. Keterlibatan yang luas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton budaya, tetapi juga menjadi

aktor yang secara aktif memproduksi, mempertahankan, dan mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Manifestasi *cultural citizenship* terlihat secara nyata dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXX, yang tidak hanya menghadirkan peserta dari Kabupaten Ponorogo, tetapi juga melibatkan kontingen dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran peserta dari Lampung, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan berbagai wilayah lainnya menunjukkan bahwa Reog tidak lagi dipandang semata-mata sebagai identitas budaya lokal Ponorogo, tetapi telah menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional. Dalam konteks ini, festival berfungsi sebagai ruang interaksi budaya yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan apresiasi antarkelompok masyarakat dari berbagai latar belakang (Susanto, A.R. 2026). Interaksi tersebut memperkuat rasa kebangsaan karena masyarakat dapat melihat keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional yang sama.

Lebih lanjut, *cultural citizenship* juga tercermin dalam upaya masyarakat Ponorogo untuk menjaga eksistensi Reog sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan identitas kolektif. Berbagai aktivitas pelestarian budaya yang dilakukan melalui Grebeg Suro menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya lokal sebagai bagian dari kontribusi terhadap kebudayaan nasional. Dalam perspektif politik pengakuan (*politics of recognition*), upaya kolektif tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tuntutan agar identitas budaya lokal memperoleh pengakuan dan legitimasi baik di tingkat nasional maupun internasional (Salim, 2022). Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika atau hiburan semata, tetapi juga berkaitan dengan penguatan posisi masyarakat sebagai bagian dari komunitas nasional yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas budayanya. Selain membentuk kesadaran kewarganegaraan budaya, Grebeg Suro juga berperan penting dalam menanamkan *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan. Dagger (1997) menjelaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada keberadaan warga negara yang memiliki karakter publik seperti tanggung jawab, kepedulian sosial, toleransi, kerja sama, dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dibentuk hanya melalui pendidikan formal atau pembelajaran di ruang kelas, tetapi memerlukan pengalaman langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, praktik budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat memiliki potensi besar sebagai sarana pembentukan karakter kewarganegaraan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penanaman *civic virtue* berlangsung melalui berbagai aktivitas yang menjadi bagian dari Grebeg Suro. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan mendorong tumbuhnya tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan festival. Masyarakat belajar bekerja sama lintas kelompok, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Praktik-praktik tersebut mencerminkan nilai gotong royong yang merupakan salah satu karakter utama kehidupan demokrasi di Indonesia. Penanaman *civic virtue* juga terlihat dari keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Partisipasi Banser Nahdlatul Ulama (NU), Kokam Muhammadiyah, komunitas seni budaya, organisasi kepemudaan, dan berbagai kelompok relawan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran kegiatan. Keterlibatan lintas organisasi tersebut menjadi bukti bahwa perbedaan afiliasi organisasi maupun latar belakang sosial tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik kewarganegaraan yang baik tumbuh melalui pengalaman kolaboratif yang berlangsung dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Aspek lain yang penting adalah keterlibatan generasi muda dalam berbagai agenda Grebeg Suro. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial generasi muda (Erita, 2025). Arus budaya global yang semakin kuat berpotensi mengurangi keterikatan generasi muda terhadap budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan strategi pelestarian yang adaptif (Nurhayati, et.al. 2024). Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Festival Reog Remaja, berbagai lomba seni budaya, kirab budaya, dan aktivitas komunitas kreatif menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda melalui pengalaman yang menarik dan partisipatif. Keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan pengetahuan mengenai budaya lokal, tetapi juga membentuk karakter sosial yang penting bagi kehidupan kewarganegaraan. Proses latihan yang panjang, kerja sama tim dalam pertunjukan Reog, disiplin dalam mengikuti jadwal kegiatan, serta

tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing merupakan pengalaman yang berkontribusi terhadap pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan bentuk nyata *civic virtue* yang berkembang melalui praktik budaya, bukan semata-mata melalui proses pembelajaran formal. Lebih jauh, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya juga berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional. Dalam perspektif kewarganegaraan budaya, individu yang memahami dan menghargai budaya lokalnya cenderung memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap identitas nasional (Billah, et.al. 2023). Hal ini terjadi karena budaya lokal menjadi salah satu fondasi yang membentuk keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, rasa bangga terhadap Reog Ponorogo dan Grebeg Suro tidak bertentangan dengan nasionalisme, melainkan menjadi salah satu bentuk ekspresi nasionalisme kultural yang berakar pada kebinekaan.

Keseluruhan dinamika Grebeg Suro menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran strategis dalam membangun kewarganegaraan yang aktif dan inklusif di era global. Melalui praktik cultural citizenship, masyarakat memperoleh ruang untuk mengekspresikan identitas budaya sekaligus memperkuat keterikatan mereka terhadap bangsa. Sementara itu, melalui proses partisipasi yang berlangsung dalam berbagai aktivitas festival, nilai-nilai *civic virtue* seperti toleransi, gotong royong, tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian sosial terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Grebeg Suro tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya tahunan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya yang berkontribusi terhadap penguatan identitas nasional dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia di tengah tantangan globalisasi.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo telah bertransformasi melampaui batas ritual tahunan menjadi sebuah laboratorium sosial yang efektif dalam membumikan Pancasila sebagai *living ideology*. Secara empiris, kelima sila Pancasila tidak hadir sebagai doktrin verbal yang kaku, melainkan termanifestasi secara organik dalam setiap rangkaian kegiatan festival. Harmonisasi antara ritual keagamaan (Simaan Al-Quran) dan ritual kebudayaan (Larungan dan Kirab) membuktikan kedewasaan implementasi Sila Ketuhanan yang inklusif. Sementara itu, penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo dan pemberdayaan UMKM melalui pasar rakyat menjadi bukti konkret bekerjanya Sila Persatuan dan Keadilan Sosial, di mana budaya berfungsi sebagai perekat kohesi nasional sekaligus tuas penggerak ekonomi kerakyatan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa Grebeg Suro beroperasi sebagai mekanisme integrasi sosial yang ampuh dalam meretas sekat-sekat primordial. Melalui perspektif *Cultural Citizenship*, festival ini memberikan legitimasi bagi masyarakat baik kelompok santri, abangan, birokrat, maupun rakyat biasa untuk mengekspresikan hak kewarganegaraan mereka melalui partisipasi budaya. Ruang pertemuan yang inklusif ini berhasil mendekonstruksi dikotomi sosial dan mengubahnya menjadi sinergi kolaboratif. Lebih jauh, keterlibatan masif generasi muda dalam pelestarian tradisi ini menjadi wahana penyemaian *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) yang otentik, membangun karakter nasionalisme yang resilien di tengah gempuran budaya global.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pemangku kepentingan terkait tidak hanya memandang Grebeg Suro sebagai komoditas pariwisata semata, melainkan harus merawatnya sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan. Diperlukan kurikulum atau narasi edukasi yang lebih eksplisit kepada generasi muda mengenai nilai-nilai filosofis di balik setiap ritual, agar tradisi ini tidak terjebak pada formalitas seremonial belaka. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai Pancasila pada partisipan festival menggunakan pendekatan kuantitatif guna mendapatkan generalisasi data yang lebih luas, serta mengkaji dampak ekonomi politik festival dalam jangka panjang.

Referensi

- Akifah, A., & Cangara, H. (2025). Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya Di Indonesia. *Jurnal Komunikologi*, 22 (01), 56-65. <https://doi.org/10.47007/jkomu.v22i01>
- Amrozi, S.R. (2021). "Keberagamaan Orang Jawa dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward." *Fenomena*, vol. 20, no. 1, 45-60. doi:10.35719/fenomena.v20i1.46.
- Anggoro, A.D., et.al. (2023). Manajemen Event Budaya Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol.7, no.1. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4434>
- Azzahra, A.H., Nawry, N. & Nelwati, S. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23–31. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2287>
- Billah, H.U., Yunita, M.A., Pratama, M.A., & Kembara, M.D. (2023). Kesadaran Berpancasila Dalam Mempertahankan Identitas Nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113–121. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1373>
- Dagger, R. (1997). *Civic virtue s, Rights, Citizenship and Republican Liberalism*. New York: Oxford University.
- Dwianto, F.A. & Hasan, Z. (2025). Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Strategi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Konstitusional Undang-Undang Dasar. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(11), 79-88. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i11.1124>
- Erita, E. (2025). Perubahan Pola Interaksi Sosial Akibat Teknologi Digital di Kalangan Mahasiswa. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 19107–19110. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.3131>
- Ghifari, Rifqi & Wibawani, Sri. (2025). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024. *Collaborative Governance in the Implementation of Grebeg Suro Ponorogo 2024. ARISTO*. 14. 439-455. [10.24269/ars.v14i1.11958](https://doi.org/10.24269/ars.v14i1.11958).
- Hanif, M. & Zulianti. (2012). Simbolisme Grebeg Suro Di Kabupaten Ponorogo. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*. 2. [10.25273/ajsp.v2i1.766](https://doi.org/10.25273/ajsp.v2i1.766).
- Khoirurrosyidin. (2018). Perayaan Grebeg Suro sebagai Potensi Pengembangan Sektor Wisata Budaya Ponorogo. *ARISTO*, 6(2), 343-353. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1027>
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nasoha, A.M.M, et.al. (2024). Kewarganegaraan dalam Tinjauan Sosial : Integrasi Sosial Warga Negara Asing di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4), 83–97. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.607>
- Nurhayati, W., Magu, S. M., & Zhang, J. (2024). Pelestarian Budaya Lokal di Tengah Arus Globalisasi. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 82–88. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i2.396>
- Nurrohman, E. (2023). Tradisi Grebeg Suro dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber. *Studi Budaya Nusantara*, 7(2). <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2022.007.02.06>
- Ode, S., & Rachmawati, N.A., (2017). Peran Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Konflik. *Jurnal Of Government - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*. 2(2), 103-119. <https://doi.org/10.52447/gov.v2i2>
- Palls, A. (2023). Konsep Collaborative Governance Dalam Bingkai Budaya Gotong Royong di Indonesia. *Jurnal Identitas*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.52496/identitas.v3i1.322>
- Petrus, B., & Siagian, R. J. (2025). Tantangan Sosial di Tengah Polarisasi Politik Identitas. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3364>

- Purwo. (2021) Grebeg Suro Sebagai Aktualisasi Diri Masyarakat Ponorogo (Sebuah Kajian Etnografi Di Ponorogo). Eduscotech, 2(1), 24-42. <https://journal.udn.ac.id/index.php/eduscotech/article/view/48>
- Rasyid, A. R., Raffli, A., Aditya, A., Rahmadani, S., Hania, Y., & Qiran, Z. F. (2024). Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pancasila Di Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2057–2069. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9674>
- Rifa'i, M. (2018). *Upacara Grebeg Suro di Ponorogo Pola Integrasi dan Akomodasi Sosial Budaya*. Jakarta: Al-Qolam.
- Rustamana, A. et.al. (2025). Menanamkan Kesadaran Akan Jati Diri Sebagai Bangsa Indonesia dan Kesadaran Untuk Mempertahankan Jati Diri Bangsa di Tengah Globalisasi. *Pengertian Integrasi Nasional, Integrasi Nasional dalam Masyarakat Pluralitas, Strategi Mewujudkan Integrasi Nasional. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 186-194. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1296>
- Salim, A.M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas. *Jurist-Diction*, 5(4), 1185–1210. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37305>
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagej.v2i2.1842>
- Stevenson, N. (2003). *Cultural Citizenship. Cosmopolitan Questions*. Berkshire: Open University Press.
- Supandi, M.D., et.al. (2024). Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Budaya Grebeg Suro Ponorogo. *Jurnal Syntax Admiration*. 5. 325-335. 10.46799/jsa.v5i2.992.
- Susanto, A.R. (2026). Festival Budaya Sebagai Media Pelestarian Warisan Leluhur Di Kabupaten Brebes. *JURNAL ILMIAH ULTRAS BREBES*, 8(1). <https://jurnal-ultras.brebeskab.go.id/index.php/ojsdata/article/view/83>
- Tahta, A.V. et.al. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Internalisasi Jati Diri Bangsa Di Era Global. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 16(2), 141-150. <https://doi.org/10.99534/995t2e82>
- Wahono, M., Sapriya, S., & Cecep Darmawan. (2022). Peran Modal Sosial Dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.19545>.